

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

DINAS SOSIAL TAHUN 2022

Email : Dinsostala@gmail.com



K A B U P A T E N T A N A H L A U T

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan masukan penyusunan LKPI Bupati Kabupaten Tanah Laut yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut.

LPPD ini secara garis besar menggambarkan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki mencakup realisasi belanja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2022. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial dengan tujuan memenuhi target Kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini secara sistematis berdasarkan hasil kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2022.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



Toko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR HUKUM	1
1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	2
1.3. DATA UMUM DINAS SOSIAL	4
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA	14
2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
2.2. REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022.....	
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	15
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2021).....	33
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	34
4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	34
4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	34
BAB V PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi untuk membantu Bupati untuk merumuskan Kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan tugas utamanya adalah meningkatkan Kesejahteraan PMKS. Untuk menggambarkan kinerja urusan pemerintah daerah yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut maka dituangkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada dasar hukum Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bidang kesejahteraan Sosial selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi).

Misi :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. **Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap Misi ke 5 (kelima).

Misi Ke-5 (lima), yakni : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Tujuan yakni :
1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Indikator Sasaran :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Tabel 1.1.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Visi	Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)		
Misi ke 5	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan	1. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS 2. Bimbingan dan Pelatihan

		kesejahteraan social	berusaha bagi keluarga miskin 3. Perluasan akses/jangkauan pelayanan kepada PMKS
Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan	1. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pemberian insentif yang memadai 3. Sertifikasi bagi PSKS

1.3. DATA UMUM DINAS SOSIAL

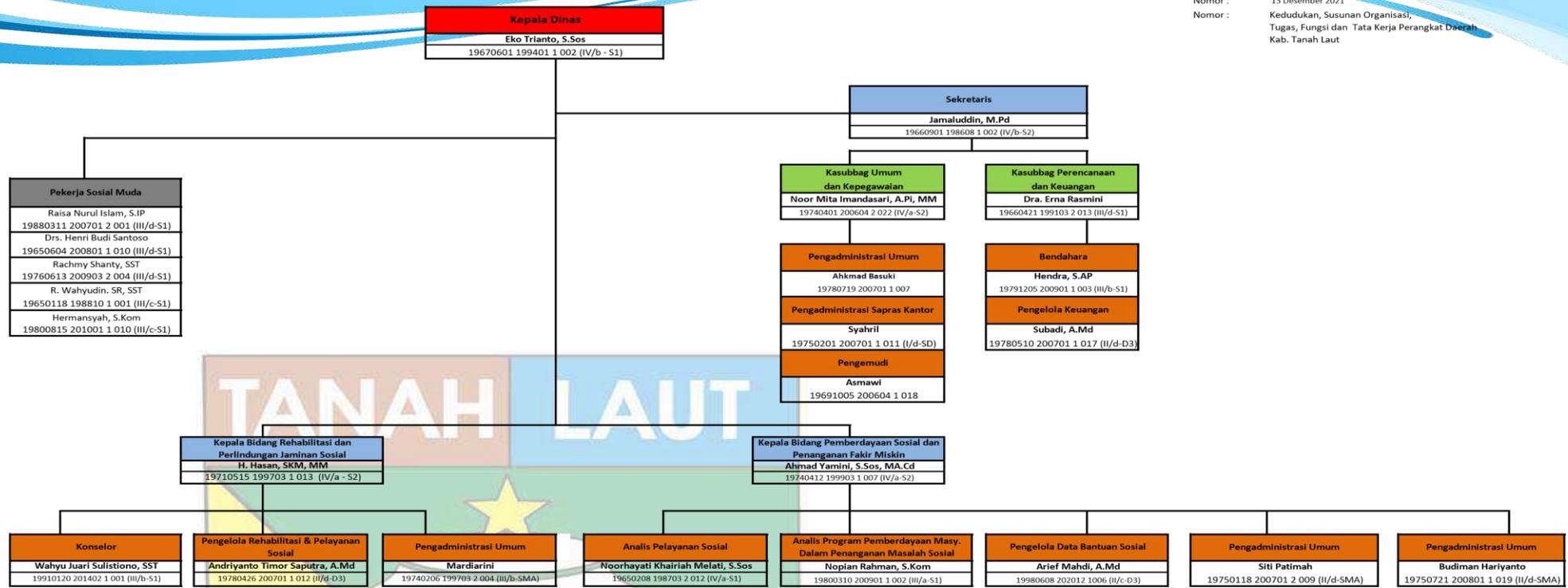
1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 adalah sebagai berikut: (Data Terlampir).

Dari bagan struktur organisasi terlampir, sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Nomor : 13 Desember 2021
 Nomor : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kab. Tanah Laut



1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d) pelaksanaan administrasi dinas;
- e) pembinaan UPT Dinas; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;

- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan umum dan kepegawaian.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial
- b. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga
- c. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- f. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dibantu 3 (tiga) sub seksi yaitu :

- a. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;
- c. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

5. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 16 (enam belas) PTT.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & PrIndngn JamSos	Jumlah
1	P N S	28					
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	1
	Pembina Tk.I	(IV/b)	-	1	-	1	2
	Pembina	(IV/a)	-	-	3	1	4
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	-	3

	Penata	III/c	-	-	2	2	4
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	2	-	2
	Penata Muda	III/a		1	1	1	3
	Pengatur Tk.I	II/d	-	3	-	1	4
	Pengatur	II/c	-	-	2	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	1	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	2	-	-	2
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	Honoror Daerah	-	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	16	-	-	16

Tabel 2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan
Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	P N S	
	Strata 2	5
	Strata 1	12
	Diploma III/IV	-
	SMA/Sederajat	9
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	28
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	3
	TOTAL	16

Permasalahan kepegawaian Dinas Sosial Antara Lain:

1. Alokasi Dan Distribusi PNS belum merata;
2. Jumlah dan Kualitas PNS belum memadai sesuai kebutuhan Jabatan;
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan masih kurang sesuai standart Kompetensi Jabatan, Kualifikasi dan perlu adanya pola pembinaan Karier PNS;
4. Penyusunan Analisis Kebutuhan pendidikan dan Pelatihan yang masih belum mengakomodir kebutuhan Diklat Aparatur Pemerintah daerah;
5. Pemetaan kebutuhan, pengelolaan serta pengembangan aparatur pemerintah daerah yang belum tersusun secara sistematis;
6. Kinerja PNS masih perlu ditingkatkan, Khususnya tingkat kedisiplinan Pegawai.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Menetapkan Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yakni:

➤ **Sasaran Strategis:**

1. Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan

➤ **Arah Kebijakan:**

1. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS
2. Bimbingan dan Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin
3. Perluasan akses/jangkauan pelayanan kepada PMKS
4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan
5. Pemberian insentif yang memadai
6. Sertifikasi bagi PSKS

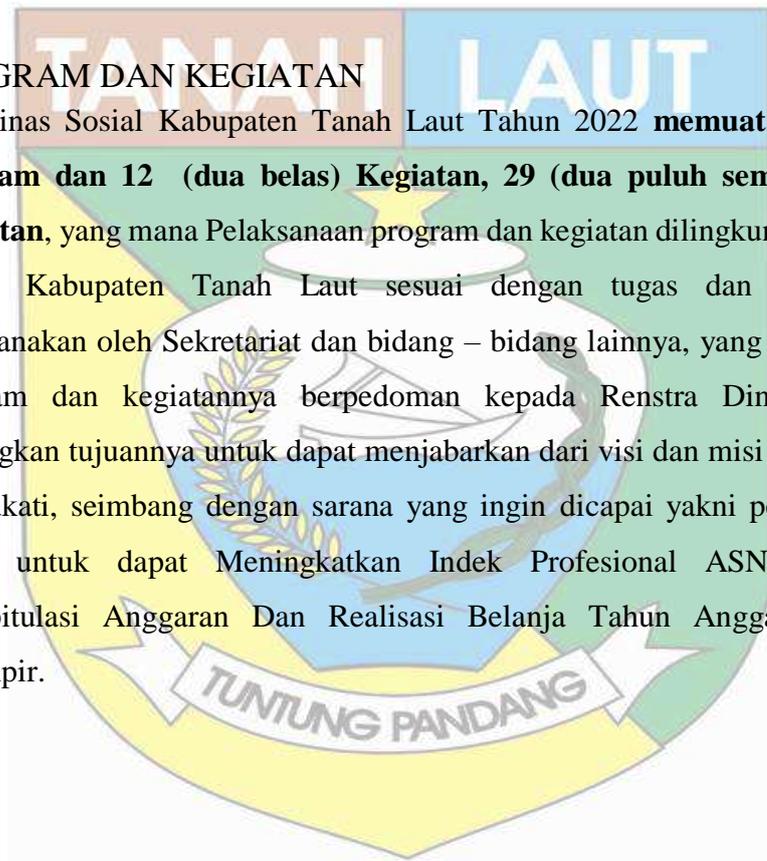
BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

Dinas Sosial ebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial membantu Bupati dalam melaksanakan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 **memuat 6 (enam) program dan 12 (dua belas) Kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan**, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang – bidang lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yakni peningkatan SDM untuk dapat Meningkatkan Indeks Profesional ASN. Adapun Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 terlampir.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 130/3425/PEM/2022 Perihal Permintaan Dokumen LKPJ, Tabel IKK LPPD, Laporan Penerapan SPM Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2022 serta Penginputan IKK *Outcome* dan IKK *Output* LPPD ke e-LPPD Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut diwajibkan untuk menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci. Terdapat 2 (dua) *Outcome* Indikator kunci yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dimana outcome dan capaian kerjanya yaitu:

IKK Outcome Tahun 2022

No IKK	Data yang diperlukan	Capaian	Keterangan Sumber Data
40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3198	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 287 orang. Anak Terlantar = 18 orang Lansia Terlantar = 2833 orang Gepeng = 60 orang Jumlah = 3198 orang.
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	17.031	Populasi : Disabilitas Terlantar = 13.880 orang Anak Terlantar = 47 orang Lansia = 3044 orang Gelandangan Pengemis = 60 orang.
41	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	8202	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan

		dasarnya dalam satu tahun anggaran 8202 jiwa.
	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	8202
		Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Tanah Laut = 8202 jiwa



IKK Output Tahun 2022

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	Capaian
1		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	17031
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3198
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	3198
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	7	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	305
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	5
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	2
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	320

		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3198
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	305
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	305
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3198
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	305
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	8202
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	121
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	250
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	8202
		6	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	515

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 **memili 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan**, dengan nilai pagu anggaran sebesar **Rp. 18.750.069.515,-** telah diserap atau direalisasikan sebesar **Rp. 13.003.243.288,-** dengan persentase **69,35%**.

Berikut merupakan capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.



Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Sub Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2022

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kemandirian PPKS			Presentase PPKS yang Mandiri	%	25	13,32	53,28	
	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	41	41	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	%	100,00	45,30	45,3	

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	45,30	45,3	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10000	8202	82,02	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2	100	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100	

		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	37	92,5	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	20	40	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	38,29	38,29	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	%	100	38,29	38,29	
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	47	94	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	18	36	

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	%	100	100	100	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani	%	100	100	100	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10000	8202	82,02	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	2	2	100	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana	%	75	0	0	

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	
	Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan sosial					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	%	77	85	110,38961	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15	15	100	

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas	%	100	100	100	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	0	0	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	11	100	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	30	25	83,333333	

		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	70	50	71,428571	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	98	98	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	130.000	126.456	97,273846	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	30.000	50.410	168,03333	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	6574	6574	100	

		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	#DIV/0!	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAMPAH LAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar		100	100	100	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100	100	100	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	40	40	100	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat daerah	%	100	100	100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	28	100	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	37	40	108,10811	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	25	100	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	0	0	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	100	

		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	15	12	80	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	100	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	0	0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	0	0	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	100	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28	100	

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5	16666,67%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Buah	0	0	0	



3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2021)

Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya pada fungsi penunjang Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada (NIHIL).



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 tidak memiliki atau menerima Tugas Pembantuan.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
Tidak Ada.



BAB V

PENUTUP

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dan Rencana Kerja di mana Program dan Kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu strategis yang berkembang serta dalam rangka pencapaian target Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara, bagi publik sendiri, LPPD akan menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini kami buat untuk bahan selanjutnya.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002